

BAB I

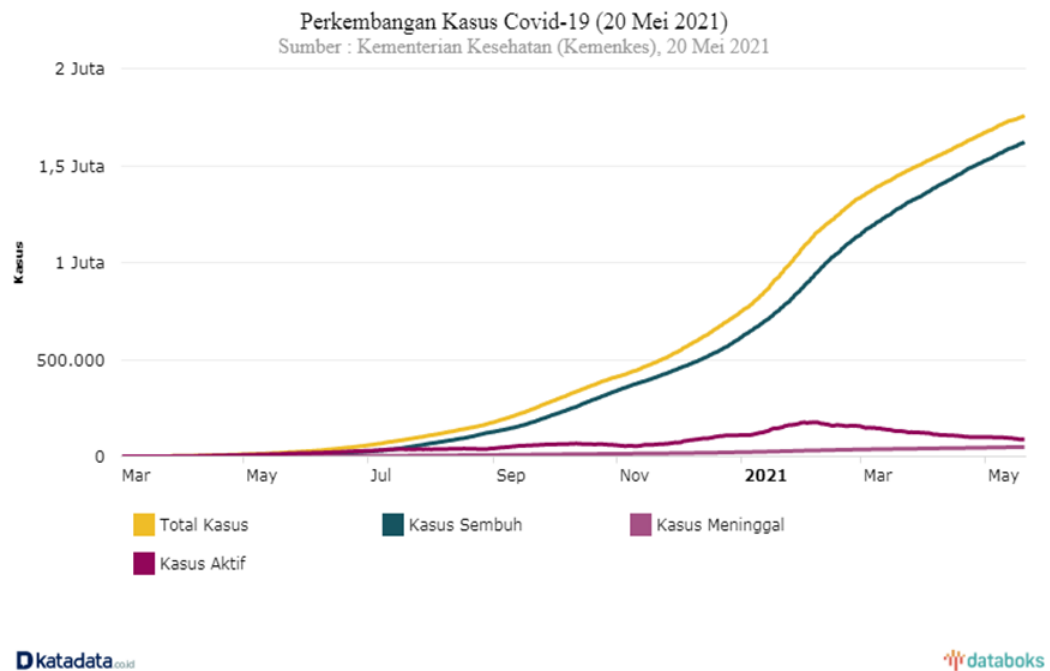
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyakit menular yang dikenal sebagai pandemi COVID-19 awalnya muncul di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019 dan disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Pandemi COVID-19 telah dinyatakan sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat di seluruh dunia oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Dampak epidemi yang menghancurkan pada kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan bidang kehidupan lainnya di negara bagian dan negara bagian merupakan alasan utama hal ini. Setelah 114 negara melaporkan kasus COVID-19, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakannya sebagai pandemi. Virus ini menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, dan hampir semua negara berjuang untuk menerapkan tindakan pencegahan yang efektif (Wawan et al. dalam Rahmansyah, 2020).

Pandemi COVID-19 telah berkembang pesat di luar Tiongkok dan ke wilayah lain di dunia, termasuk Indonesia. Presiden Joko Widodo dari Indonesia mengumumkan kasus awal COVID-19 pada 2 Maret 2020, setelah bermanifestasi di distrik Depok, Jawa Barat (Bernie, dalam Rahmansyah 2020). Kamis, 20 Mei 2021, terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia sebanyak 5.797 kasus, berdasarkan laporan pemerintah yang dihimpun dari data yang tersedia di www.covid19.kemkes.go.id. Dengan demikian, total kasus menjadi 1.758.898 kasus. Dari mereka yang telah dirawat, 1.621.572 dinyatakan sembuh (92,19%),

sementara 48.887 meninggal dunia (2,78%). Jumlah mereka yang ditetapkan sebagai "Orang Dalam Pemantauan" (73.807) juga tinggi.



Gambar 1.1 Perkembangan Terkini Covid-19 di Indonesia

Banyak bidang yang terkena dampak penyebaran COVID-19; termasuk sektor kesehatan, ekonomi, dan pendidikan, antara lain. Pemerintah Indonesia telah meningkatkan pendanaan untuk operasi tanggap COVID-19, antara lain, dalam upaya untuk mengurangi dampak virus dan menghindari wabah di masa mendatang. Aktivitas di banyak bidang kehidupan, termasuk pendidikan, juga telah mengalami perubahan yang signifikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan penyesuaian kebijakan pendidikan dan menawarkan bantuan serta alternatif sebagai respons terhadap larangan pembelajaran tatap muka yang diberlakukan untuk membendung penyebaran virus COVID-19 dan memastikan peserta didik tetap dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar secara

teratur. Hingga Maret 2020, sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia memperkenalkan program pembelajaran daring atau jarak jauh. Sekolah diberi kewenangan untuk memilih kurikulum yang dianggap sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik selama pandemi.

Pemerintah Indonesia telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPP) pada tanggal 13 Maret 2020. Salah satu tugas GTPP Covid-19 adalah menghidupkan kembali perekonomian negara. Hal ini diperlukan karena ekonomi global sedang melambat dan dunia industri terdampak signifikan akibat pandemi ini, yang berdampak signifikan terhadap perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia. Pertama, tekanan yang cukup besar terhadap bisnis manufaktur mobil, yang mengakibatkan penurunan produksi, yang merupakan salah satu dampak negatif bagi sektor industri. Kedua, kebijakan jaga jarak fisik, (PSBB), dan kebijakan terkait lainnya menyebabkan kerugian dan kinerja yang buruk di beberapa sektor, termasuk pariwisata, transportasi, hotel, restoran, dan lainnya. Ketiga, beberapa bisnis lain terdampak, termasuk industri perfilman, media, dan pers, yang terpaksa menunda produksi, pemutaran, konten, dan pencarian berita (Ibrahim, dalam Khoiriyah et.,al 2020). Sebagai akibat dari dampak tersebut, banyak orang kehilangan pekerjaan, pendapatan menurun, dan banyak perusahaan merugi, sehingga banyak pengusaha terpaksa tutup.

Saat ini, kelompok masyarakat yang kurang beruntung di Indonesia semakin bertambah akibat PHK besar-besaran. Sebelum merebaknya COVID-19, sudah ada sejumlah program pemerintah yang membantu daerah-daerah yang berisiko. Namun, pemerintah justru memberikan bantuan sosial tambahan sejak wabah

tersebut muncul. Banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal pendapatannya berkurang drastis atau bahkan hilang sama sekali sehingga bantuan sosial khusus ini diperlukan. Banyak pelaku usaha yang melakukan PHK terhadap karyawan dan daya beli masyarakat menurun, sehingga menyebabkan peningkatan jumlah kelompok rentan (Barany et al., dalam Rahmansyah, 2020).

Pandemi COVID-19 berdampak pada beberapa daerah, termasuk Sumatera Barat. Berikut ini tabel 1.1 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2020 menurut statistik BPS:

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat

Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase
Triwulan Pertama	3.85%
Triwulan Kedua	-4.93%
Triwulan Ketiga	-2.92%
Triwulan Keempat	-2.23%

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat 2020

Rata-rata laju pertumbuhan perekonomian Sumatera Barat triwulan II 2020 tumbuh -4.93% terkontraksi dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya yaitu sebesar 5.05%. Provinsi Sumatera Barat mengalami pertumbuhan yang negatif dikarenakan imbas Covid-19 (Fitriani & Rozani, 2021). Dalam kurun waktu 2010-2020 rata-rata laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Barat sebesar 1.29% dengan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2019 sebesar 5,38% naik menjadi 6,88% di tahun 2020 (BPS Sumatera Barat, 2020).

Untuk menekan jumlah kasus COVID-19 yang terkonfirmasi, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah, termasuk pemisahan fisik, WFH, penggantian pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring di semua

jenjang pendidikan (formal dan informal), dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Meskipun terjadi kemerosotan ekonomi terakhir di Indonesia, termasuk ekonomi desa, inisiatif-inisiatif ini masih dilaksanakan secara seragam di seluruh negeri. Dampak COVID-19 akan sangat terasa bagi penduduk kota. Ada risiko penyebaran wabah COVID-19 ke daerah pedesaan karena pekerja musiman cukup mobile dan sering berpindah-pindah antara kota dan desa. Akibat tidak cukupnya uang untuk menutupi biaya hidup pokok, tingkat konsumsi di sektor ekonomi rumah tangga menurun drastis seiring meluasnya pandemi COVID-19 di daerah pedesaan. Ketika pencari nafkah bergantung pada bantuan keuangan dari kerabat, situasi bisa memburuk dengan cepat. Kemampuan memenuhi kebutuhan dasar rumah dan keluarga jelas berkurang akibat situasi ini. Tanpa disadari, masyarakat terjerumus dalam lingkaran kemiskinan ketika mereka tidak memiliki kejelasan tentang pemenuhan kebutuhan pokok. Pemerintah telah mengambil banyak langkah untuk melindungi penduduk paling rentan dari pandemi COVID-19 mengingat besarnya bahaya ekonomi yang ditimbulkan oleh kemiskinan dan pengangguran.

Menanggapi resiko tersebut, banyak langkah telah dilakukan, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur kebijakan keuangan negara serta stabilitas sistem keuangan. Undang-undang ini ditetapkan untuk melindungi beberapa aspek masyarakat, khususnya sektor sosial dan ekonomi, yang terancam oleh epidemi. Di daerah-daerah yang kurang mampu secara ekonomi, pemerintah telah meluncurkan sejumlah upaya, termasuk program bantuan sosial, untuk merevitalisasi ekonomi.

Meskipun banyak program telah dilaksanakan sebelum epidemi, jumlah individu yang mendapatkan bantuan sosial telah meningkat selama epidemi. Dua bentuk bantuan pemerintah yang paling umum adalah program bantuan reguler dan program bantuan non-reguler. Bentuk-bentuk bantuan pemerintah yang umum termasuk kupon makanan, Kartu Manfaat Pra-Kerja, dan Program Keluarga Harapan. Program Bantuan Pangan Non-Tunai, Pembebasan Biaya Listrik, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah satu-satunya yang tidak mengikuti kriteria ini. Program bantuan sosial pemerintah dapat membantu pemulihan ekonomi dan pengurangan kesenjangan sosial ekonomi setelah bencana seperti COVID-19, ketika banyak orang berjuang untuk membayar biaya hidup pokok mereka.

Pemanfaatan dana masyarakat adalah salah satu cara pemerintah memerangi dan menaklukkan ekonomi di tingkat lokal. Bahasa Indonesia: Untuk membantu secara aktif menanggulangi dampak pandemi terhadap keluarga dan desa, dana desa dapat digunakan, misalnya, melalui program Bantuan Langsung Tunai, yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak oleh epidemi. Penggunaan Dana Desa yang tepat dapat memberikan bantuan keuangan langsung kepada desa yang terdampak, sebagaimana dirinci dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020, yang membahas Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penanggulangan Pandemi COVID-19 di Desa. Perppu Nomor 1 tersebut yang mengatur tentang strategi keuangan untuk mengelola dan mengatasi pandemi COVID-19 di desa, merupakan instrumen baru untuk meringankan beban ekonomi desa sebagai akibat dari pandemi. Menurut aturan tersebut, *refocusing*

memerlukan pengalihan prioritas pendanaan, melakukan perubahan dana, dan/atau mengurangi atau menunda penyaluran anggaran transfer ke daerah dan keuangan desa sesuai kriteria tertentu (Pasal 2 ayat (1) huruf (i)).

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu daerah di Sumatera Barat yang terkena dampak parah pandemi COVID-19. Kabupaten Tanah Datar mengalami peningkatan kemiskinan, pengangguran, dan jumlah orang yang dinyatakan positif COVID-19. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penggunaan Utama Dana Desa Tahun 2020 dalam rangka persiapan menghadapi kemungkinan dampak pandemi COVID-19 terhadap pembangunan desa salah satu dengan dana desa akan digunakan terutama untuk program bantuan langsung tunai dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi pandemi COVID-19 (Azhari & Suhartini, 2021).

Selanjutnya dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengutamaan penggunaan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa untuk tiga bidang pada tahun 2020: (1) pencegahan dan penanganan COVID-19; (2) dana desa padat karya; dan (3) bantuan langsung tunai melalui dana desa.

Sebagai respon terhadap dampak pandemi COVID-19, pemerintah menyelenggarakan program BLT-DD untuk membantu warga desa

berpenghasilan rendah. Menurut Arumdani (2020), warga berpenghasilan rendah yang memenuhi kriteria dapat memperoleh bantuan BLT Dana Desa sebesar Rp600.000,- per bulan selama tiga bulan, dilanjutkan dengan bantuan BLT Dana Desa sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan berikutnya. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah program pemerintah berjenis pemberian uang tunai yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang tergolong miskin. Ini merupakan suatu bentuk pemberdayaan di bidang ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

BLT Dana Desa diperuntukkan bagi masyarakat yang belum terbantu oleh program sosial pemerintah sebelumnya. Program lainnya adalah bantuan sosial langsung tunai (BST). Sebagai bagian dari program bantuan sosial desa, yang menyediakan berbagai macam dukungan, sepuluh juta keluarga akan mendapatkan Rp600.000,- setiap bulan selama tiga bulan dan Rp300.000,- setiap tiga bulan setelahnya (Sofi, 2021). Mengingat kerentanan penduduk desa terhadap pandemi, menarik untuk mengkaji bagaimana dana bantuan sosial desa, atau BLT Dana Desa, didistribusikan ke berbagai jenis bantuan selama krisis. Mereka yang memenuhi syarat untuk program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk tinggal di masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak menerima bantuan pemerintah lainnya.

Kecamatan Pariangan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa.

Menurut Sensus Badan Pusat Statistik Tanah Datar 2020 jumlah penduduk yang tersebar di Kecamatan Pariangan di antaranya berjumlah 20.744 jiwa yang terdiri atas 10.406 laki-laki dan 10.338 Perempuan. Dengan jumlah masyarakat yang juga cukup banyak tentu juga memiliki beberapa problematika terkait dampak dari wabah penyakit ini. Adanya bayang-bayang penurunan pendapatan serta menurunnya ekonomi diakibatkan wabah, semakin meningkatkan resiko banyaknya masyarakat yang miskin.

Prioritas pemberian bantuan sosial dari keuangan desa ditetapkan di Kecamatan Pariangan sesuai dengan Instruksi Presiden Maret 2020. Sekitar 642 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) KPM mulai menerima Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa pada April 2020, jika memenuhi persyaratan, seperti tidak menerima bentuk bantuan sosial lainnya. Merupakan tanggung jawab masing-masing desa di Kecamatan Pariangan untuk mendistribusikan uang daerah yang membayar dukungan ini. Dalam penyaluran BLT-DD, Camat Pariangan menghimbau kepada seluruh Wali Nagari (Kepala Desa) untuk mengorganisasikan diri sebagai Relawan Covid-19. Para relawan ini akan bertugas melakukan pendataan hingga data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ditetapkan, baik melalui musyawarah desa maupun musyawarah insidentil. Musyawarah ini menentukan keluarga penerima bantuan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu dari tingkat kemiskinan kepala keluarga.

BLT Dana Desa mendapat banyak tanggapan dari warga setempat. Meskipun tidak semua senang, beberapa merasa ragu. Banyak yang menilai program ini kurang membantu, lamanya waktu pencairan, dan kurang tepat sasaran..

Meskipun epidemi COVID-19 telah menyentuh hampir semua orang, hanya sebagian kecil dari populasi yang mendapatkan bantuan.

Pelaksanaan semua kebijakan, rencana, dan kegiatan secara efektif sangatlah penting. Prosedur dan lembaga pemerintah harus efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efisien; ini merupakan salah satu prinsip tata kelola yang baik. Tingkat pemenuhan tanggung jawab organisasi dengan cara yang mencapai tujuan bersama sesuai dengan tolok ukur yang telah ditentukan sebelumnya dikenal sebagai efektivitasnya. Efektivitas, menurut Dunn (dalam Arumdani, 2017) adalah ukuran untuk memilih di antara banyak alternatif yang disarankan yang mempertimbangkan apakah alternatif tersebut memberikan hasil (dampak) yang maksimal, terlepas dari masalah efisiensi.

Bantuan langsung tunai dana desa yang disalurkan kepada masyarakat bertujuan untuk menopang perekonomian warga desa yang melemah akibat pandemi, menjaga daya beli masyarakat dan menciptakan kesejahteraan. Dalam hal ini program BLT Dana Desa sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mempertahankan kesejahteraan masyarakat terdampak pandemi harus dapat mencapai tujuan. Berhasil tidaknya suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat dilihat dari efektif atau tidaknya program tersebut dalam mencapai tujuannya.

Menurut Makmur (2015:6) efektivitas program adalah kegiatan yang menunjukkan ketepatan antara harapan dengan hasil yang ingin dicapai sehingga

dapat dikatakan bahwa kegiatan yang dijalankan dengan kemampuan operasional yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian efektivitas program merupakan wujud dari rencana tujuan yang dilakukan kelompok dan di dalamnya terdapat wewenang dan tanggung jawab. Monterio (2019:295) menjelaskan bahwa suatu organisasi, program atau aktivitas dievaluasi efektif jika yang didapatkan mampu memenuhi tujuan yang diharapkan. Menurut Oktavia et al., (2020) ketepatan penentuan pilihan, waktu, tujuan dan sasaran adalah indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur keefektifan suatu program. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas perlu dilakukan karena nantinya akan terlihat seberapa efektif BLT-DD tersebut dalam memberikan kontribusi terhadap kehidupan masyarakat selama pandemi COVID-19 (Herdiana dalam Arumdani, 2020).

Sejumlah penelitian telah mengangkat topik bantuan langsung tunai; Salah satunya adalah penelitian (Kusuma,2016) terkait "Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program BLT di Desa Ngadirejo, Kabupaten Kartasura" yang menemukan bahwa pelaksanaan BLT secara umum kurang efektif. Hal ini terlihat dari belum meratanya sosialisasi yang ditempuh, sehingga banyak penerima bantuan yang masih belum mengetahui seluk-beluk program tersebut.

Penelitian lain dilakukan oleh Nafida Arumdani dkk., (2021) dengan judul Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Setelah lima bulan penyaluran BLT-DD di Desa Mojoruntut, para penerima manfaat program bantuan tersebut sudah mulai merasakan hasilnya, sebagaimana yang dipaparkan dalam penelitian tersebut. Meskipun demikian, masyarakat dan Pemerintah Desa masih terus

menghadapi ketegangan akibat adanya persepsi ketidakadilan, seleksionisme, dan nepotisme dalam proses penyaluran bantuan. Akibatnya, daftar penerima BLTDD tidak memenuhi standar pemerintah. Berikutnya, pada tahun 2023, peneliti Hariati dan Rijali meneliti efektivitas program BLT untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak pandemi COVID-19 di Desa Kupang Nunding, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong. Temuan mereka sangat mirip.

Menurut penelitian Sufiati (2021) terkait Efektivitas Pengelolaan BLT Dana Desa selama pandemi dipengaruhi oleh Sistem Pengendalian Internal, efektivitas program ini kurang. Hal ini disebabkan oleh minimnya dana untuk program tersebut, yang mengakibatkan banyak warga desa tidak memenuhi syarat untuk menerimanya. Persoalan lainnya adalah adanya ketidaksesuaian data yang digunakan untuk menentukan siapa yang seharusnya menerima bantuan sehingga menyebabkan sasaran penyaluran tidak tepat.

Temuan penelitian ini berbeda jauh dengan penelitian Safitri dan Pradana (2023) tentang efektivitas penyaluran bantuan langsung tunai dari dana desa di Desa Turi, Kabupaten Magetan. Dari tujuh indikator yang ada, dua indikator dinilai cukup efektif, yaitu ketepatan pelaksanaan instruksi dan ketepatan penetapan target. Oleh karena itu, agar penentuan KPM tepat sasaran, pemerintah harus menetapkan standar yang mudah disesuaikan dengan iklim sosial saat ini, update data secara berkala, serta memberikan edukasi tentang semua aspek yang diperlukan dalam proses penyaluran bantuan, termasuk kriteria penerima, persyaratan administratif, dan cara mengajukan bantuan dengan benar kepada KPM. Sesuai dengan penelitian sebelumnya tentang efektivitas penyaluran

bantuan langsung tunai dari kas desa ke desa terdampak COVID-19, penelitian ini dilakukan di Desa Kepatihan, Kabupaten Jombang. Ketepatan waktu, ketepatan pemilihan, ketepatan pengukuran, dan ketepatan sasaran merupakan empat dari delapan faktor efektivitas program yang menunjukkan kinerja kurang baik dalam penelitian ini (Firmansyah, 2022). Karena kriteria dan cara pelaksanaannya tidak selaras, hasil yang dicapai pun kurang maksimal. Diharapkan pemerintah desa akan lebih berhati-hati saat memilih orang yang akan menerima bantuan, dan pemerintah federal dapat menggunakan peraturan program BLT yang tidak tepat sebagai dasar evaluasi.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini membahas mengenai Pengaruh Efektifitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Terhadap Masyarakat yang Terdampak Covid-19. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu apakah Bantuan Langsung Tunai yang diterima dapat memenuhi kebutuhan ekonomi sesuai dengan kebutuhan pokok bulanan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan tersebut. Jika Bantuan Langsung Tunai dana desa dapat memenuhi kebutuhan pokok bulanan KPM maka program tersebut dapat dikatakan efektif, sebaliknya jika bantuan tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok bulanan KPM maka program tersebut bisa dapat dikatakan tidak efektif terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Pemulihan Ekonomi di Desa antara lain:

1. Ketidaksesuaian data perangkat desa dalam menentukan penerima bantuan termasuk penerima BLT Desa yang mengakibatkan tidak tepatnya sasaran dan ketersediaan infrastruktur penyaluran.
2. Kurangnya profesionalisme kepala desa, aparat desa dan relawan pendataan dalam menetapkan calon penerima BLT.
3. Keterbatasan anggaran desa untuk BLT menyebabkan banyak warga desa tidak terdaftar sebagai penerima bantuan tunai langsung dari dana desa.
4. Tidak ada standarisasi dan kurang selektifnya pemerintah dalam melakukan pendataan untuk menetapkan KPM sehingga menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran
5. Kurangnya sosialisasi kepada KPM tentang persyaratan penerima, prosedur administrasi, dan pengambilan bantuan sehingga informasi yang diterima KPM tidak lengkap dan membingungkan.
6. Ketepatan waktu, ketepatan pilihan, ketepatan pengukuran, dan ketepatan sasaran menjadi tidak optimal dan memengaruhi efektivitas bantuan karena adanya perbedaan antara standar penerapan dan pelaksanaannya.

1.3 Perumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tingkat Program (BLT) Dana Desa di Kecamatan Pariangan sudah Efektif?
2. Apakah Waktu Penerimaan (X1) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sudah tepat di Kecamatan Pariangan?
3. Apakah Besaran Penerimaan (X2) BLT dapat memenuhi kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat bantuan tersebut di Kecamatan Pariangan?
4. Apakah *Family Size* (X3) memengaruhi Efektivitas (Y) Program BLT Dana Desa di Kecamatan Pariangan?
5. Jika Ketepatan Waktu Penerimaan (X1), Besaran Penerimaan (X2) dan *Family Size* (X3) sesuai apakah memengaruhi Efektivitas (Y) Program (BLT-DD) di Kecamatan Pariangan.

1.4 Tujuan Penelitian

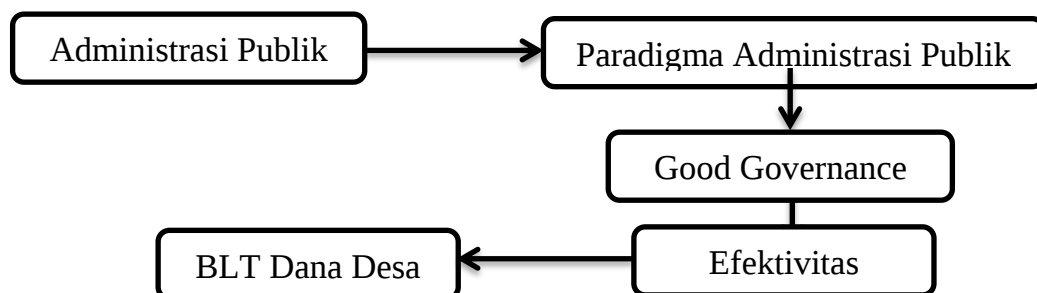
1. Menganalisis tingkat Efektivitas Program (BLT) Dana Desa di Kecamatan Pariangan
2. Menganalisis pengaruh Ketepatan Waktu Penerimaan (BLT) Dana Desa di Kecamatan Pariangan
3. Menganalisis Besaran Penerimaan (BLT) dalam memenuhi kebutuhan pokok bagi KPM bantuan tersebut di Kecamatan Pariangan
4. Menganalisis pengaruh *Family Size* terhadap (BLT) Dana Desa di Kecamatan Pariangan

5. Menganalisis Ketepatan Waktu Penerimaan, Besaraan Penerimaan dan *Family Size* jika sesuai apakah berpengaruh terhadap Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kecamatan Pariangan

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Peneliti. Selama kuliah Strata I Ilmu Administrasi Publi di Universitas Diponegoro Semarang, peneliti memiliki kesempatan untuk menerapkan pengetahuan yang dipelajari dalam penelitian ini. Ini juga akan membantu memahami masalah yang berkaitan dengan manajemen keuangan pemerintah daerah Kecamatan Pariangan dan menemukan solusi untuk masalah tersebut.
2. Instansi. Penelitian ini ditumpukan agar meningkatkan khazanah eksperimentasi terutama seperti disertasi yang bertopik efektivitas.
3. Masyarakat. Pemerintah Daerah, khususnya Kecamatan Pariangan, dapat menggunakan penelitian ini sebagai sumber masukan atau referensi.

1.6 Kerangka Teori



1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.6.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
Program Bantuan Langsung Tunai (Sebelum Pandemi Covid-19)				
1.	Nugroho Kusuma “ Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kertasura” <i>Jurnal Ekonomi Pembangunan 2016</i>	Mengetahui implementasi BLT dan penangan kemiskinan di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kertasura Teori Implementasi Kebijakan Edward III	Kualitatif deskriptif, dimana informan dari penelitian ini yaitu 4 ketua RT, Lurah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan warga Kelurahan Ngadirejo. Data dalam penelitian ini diolah dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif	Implementasi BLT di di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kertasura berjalan kurang baik hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang diberikan belum merata masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui prosedur, syarat serta kriteria masyarakat yang mendapatkan BLT. Selain itu belum adanya kerja sama antara berbagai pihak sehingga data yang didapatkan terkadang berbeda dengan yang ada dialapangan, hal ini mengakibatkan BLT berjalan tidak tepat sasaran.
Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Covid-19				
2.	Carly Erfly Fernando Maun “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana	Mendeskripsikan dan melihat keefektifitas dari program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Talaitad	Metode kualitatif. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data	Penyaluran program BLT Dana Desa di Desa Talaitad dapat dikatakan sudah efektif hal ini dapat dilihat dari tiga indikator, yaitu 1) Ketepatan Waktu (sudah

	Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan” <i>Jurnal Politico Vol. 9, No. 2 2020</i>	Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan Teori Efektivitas (Makmur, 2010)	terdiri dari hasil wawancara, pengamatan dan dokumen dan arsip. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif.	tepat waktu dan mengikuti mekanisme yang ada), 2) Ketepatan dalam menentukan pilihan (pemerintah desa sudah bekerja sesuai dengan prosedur,) dan 3) Ketepatan Sasaran (pemberian bantuan langsung tunai dana desa di Desa Talaitad sudah tepat sasaran. Hal tersebut didasari oleh pernyataan masyarakat yang merasakan langsung dampak BLT).
3.	Greaccela Alda Rahma Dany, Siti Maizul Habibah “Efektivitas BLT Bagi Warga Non-PKH Sebagai Pemenuhan Hak Perlindungan Sosial Selama Covid-19 di Dusun Sudimoro” <i>Kajian Moral dan Kewarganegaraan. Volume 09 Nomor 02 Tahun 2021</i>	Mendeskripsikan dan mengukur efektivitas BLT sebagai bentuk pemenuhan hak perlindungan sosial bagi warga Non-PKH Dusun Sudimoro. Teori Efektivitas Gibson, Donnely dan Ivancevich	Kuantitatif dekriptif. Populasi terdiri dari 597 warga Non-PKH sampel yang digunakan menggunakan teknik sampel area sebanyak 39 warga Dusun Sudimoro. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan data Numerik yang ada pada dokumen Pemerintah Desa Jeruk Legi yang kemudian dianalisis menggunakan rumus deskriptif persentase berdasarkan pada kategori rendah, sedang, tinggi,	Efektivitas BLT sebagai bentuk pemenuhan hak perlindungan sosial bagi warga Non-PKH selama pandemi Covid-19 di Dusun Sudimoro Desa Jeruk Legi memiliki persentase yang tinggi, yakni sebesar 80,8% secara keseluruhan hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program berjalan sesuai dengan tujuan program yang dimuat pada UU No.2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan, serta tingkat coverisasi pengeluaran selama pandemi Covid-19 sebesar 22,3%

			sangat tinggi.	yang melebihi target coverisasi oleh pemerintah sebesar 10%.
4.	Irfan Sofi “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa” <i>Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik, 6(3), 247-262.2021</i>	Memahami efektivitas pelaksanaan BLT Desa dan kendala dalam pemulihan ekonomi di desa-desa. Teori aspek efektivitas (Muasaroh, 2010) dan Teori Kebijakan Publik-Subsidi	Kuantitatif deskriptif dimana jumlah sampel ada sebanyak 33 desa yang mewakili wilayah kepulauan yang terbagi menjadi enam wilayah yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali Nusa Tenggara, dan Maluku Papua	Efektivitas pelaksanaan BLT Desa dari aspek peraturan, fungsi dan tugas, rencana dan hasil dapat berjalan dengan sangat efektif. Hal ini juga dapat kita lihat dari hasil pembagian antara outcome dengan output pelaksanaan BLT Desa yang menunjukkan angka 114,93 persen. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi antara lain adanya keterbatasan anggaran Dana Desa untuk BLT Desa, ketidaksesuaian data dalam penentuan penerima bantuan termasuk penerima BLT Desa dan ketersediaan infrastruktur penyaluran.

5.	Nafida Arumdani, Salsabella Nanda Rahmania, Zumrotun Nafi'ah dan Tukiman “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Mojaruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo”. <i>Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 2, No.5 Mei 2021</i>	Mengetahui efektivitas pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa di Desa Mojaruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Teori Efektivitas (Makmur, 2010)	Kualitatif dengan menggunakan teori efektivitas dengan indikator: ketepatan waktu, ketepatan dalam menentukan pilihan dan ketepatan sasaran. Sumber data terdiri dari hasil wawancara pengamatan dan dokumen serta arsip. Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis data deskriptif kualitatif (non-statistik).	Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Mojaruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo jika dilihat efektivitasnya melalui ketepatan waktu, dapat disimpulkan Desa Mojaruntut sudah tepat waktu dan sudah sesuai dengan mekanisme, sedangkan dalam hal ketepatan menentukan pilihan. Dapat disimpulkan masih Adanya sikap nepotisme meskipun dalam prosesnya sesuai dengan prosedur yang berlaku, dalam aspek ketepatan sasaran, dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan langsung tunai dana desa di Desa Mojaruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo sudah tepat dan digunakan sesuai dengan tujuan Adanya BLTDD ini.
6.	Ririn, Lilis Suryani “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Bamban Kecamatan Benua Lima Kabupaten	Mengetahui bagaimanakah efektivitas program bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) di desa Bamban kecamatan Benua Lima	Kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data terdiri dari tiga cara, yaitu observasi, angket, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan statistik	Efektivitas penyaluran program bantuan langsung tunai dana desa di Desa Bamban Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur dikategorikan “sangat efektif” dengan presentasi sebesar 84,5%.

	Barito Timur” <i>JAPB : Volume 4 Nomor 2, 2021</i>	kabupaten Barito Timur, dan mengetahui seberapa besar efektivitas program BLT dana desa di desa Bamban kecamatan Benua Lima kabupaten Barito Timur. Teori Efektivitas Program (Budiani, 2007)	sederhana. Teknik pengambilan sampel adalah sampel jenuh sebanyak 12 (dua belas) orang.	
7.	Sufiati, et.al., “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Efektivitas Pengelolaan BLT-DD pada Masa Pandemi” <i>Jurnal Mirai Management, 6 Issue 2, 2021</i>	Mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap efektivitas pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi di Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. Teori Efektivitas (Makmur, 2010) dan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal.	Kuantitatif asosiatif kausal. Populasi penelitian adalah seluruh perangkat Desa Bonto Jai dengan teknik pengambilan sampel adalah sampling jenuh. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Skala pengukuran data dengan skala likert. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi sederhana dengan bantuan program SPSS versi 26.0.	Efektifvitas pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa belum berjalan efektif, hal ini terjadi karena terbatasnya anggaran dana desa yang kurang dari 800 juta/tahun sehingga alokasi dana desa untuk program bantuan langsung tunai dana desa hanya sebesar 25% yang mengakibatkan masih banyak dari kalangan warga desa yang tidak terdaftar sebagai calon penerima bantuan langsung tunai dana desa dan adanya kesalahan database perangkat desa yang mengakibatkan tidak tepatnya sasaran dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
8.	Umar Sako Baderan,	Mengetahui efektivitas	Kualitatif Deskriptif.	Dari 7 indikator yang diuji terdapat

	Dian Fitriani Karim <i>“Effectiveness of Direct Cash Aid Distribution During the Covid-19 Pandemic in Makmur Abadi Village, Tolangohula District, Gorontalo Regency”</i> <i>Journal of Management and Administration Provision Vol. 1, Issue 2, 2021 : 33-38</i>	penyaluran bantuan langsung tunai pada masa pandemi Covid-19 di Desa Makmur Abadi Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo. Teori Efektivitas Gibson dalam Tangkilisan (2005)	Sumber data dalam penelitian ini, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pendamping Desa Kecamatan Tolangohula, 2 Badan Permusyawaratan Desa, dan 10 Warga Masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi lapangan. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu Reduksi Data, Display Data, dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi	3 indikator yang dapat dikatakan efektif, yaitu (Kejelasan tujuan yang ingin dicapai, Ketersediaan sarana dan prasarana, Sistem pengawasan dan pengendalian). Dan 4 indikator yang belum efektif, yaitu (Kejelasan strategi pencapaian tujuan, Proses analisis dan perumusan kebijakan yang solid, Perencanaan dan indikator yang matang, Penyusunan program yang tepat).
9.	Winona Islamay Firmansyah. <i>“Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Kepatihan Kabupaten Jombang”</i> <i>Publika. Volume 9</i>	Mendeskripsikan efektivitas dari program BLT-DD yang dilakukan di Desa Kepatihan Kabupaten Jombang. Teori Efektivitas (Makmur, 2015:7)	Kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi, studi literasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan berdasarkan delapan	Dari delapan indikator efektivitas program, terdapat empat indikator yang menunjukkan hasil yang kurang optimal, yakni pada indikator ketepatan waktu, ketepatan pilihan, ketepatan dalam pengukuran dan ketepatan sasaran. Kesenjangan yang terjadi antara standar yang ditetapkan dengan implementasinya mengakibatkan hasil yang dicapai kurang memuaskan. Kebijakan yang tidak

	Nomor 5. Tahun 2022		indikator efektivitas program, yaitu ketepatan penentuan waktu, perhitungan biaya, pengukuran, menentukan pilihan, ketepatan dalam berpikir, ketepatan dalam melakukan perintah, menentukan tujuan dan ketepatan sasaran.	harmonis yang mendasari program BLT dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat dan bagi pemerintah desa diharapkan lebih selektif dalam memilih calon penerima bantuan.
10.	Aceng Ulumudin, Yagus Triana, Mulyaningsih, Gugun Geusan Akbar. <i>“The Effectiveness of Direct Cash Village Fund Program in 2021”</i> <i>Journal of Governance Volume 7 Issue 4, 2022 : 894-902</i>	Mendesripsikan dan menjelaskan efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Mekarsari, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Teori Efektivitas Prosper (ketepatan waktu, ketepatan dalam memilih KPM, dan ketepatan sasaran).	Kualitatif Deskriptif. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data diawali dengan meninjau sumber-sumber hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan-kesimpulan	Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Mekarsari Tahun 2021 terkait faktor ketepatan waktu sudah cukup efektif dan berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya masih ada keterbatasan yakni akses ke beberapa desa yang sulit dijangkau sehingga mengakibatkan tertundanya penyaluran bantuan tersebut selama beberapa bulan. Dalam penentuan calon keluarga penerima manfaat (KPM) dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

				walaupun ada isu nepotisme sudah tertangani. Sedangkan untuk ketepatan sasaran tidak efektif karena ada ketidakcocokan informasi dan sosialisasi antar Pemerintah Desa Mekarsari dan masyarakat, mengakibatkan masyarakat yang seharusnya menerima manfaat Program Bantuan Tunai Dana Desa tidak menerimanya.
11.	Jemmy Idrus <i>“Effectiveness Of Direct Cash Assistance In Independent Villages In Barru Regency”</i> <i>Journal Of Humanities, Social Sciences And Business Volume 2 Issue 1 Tahun 2022</i>	Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam proses penyaluran, kesesuaian Kriteria Penetapan Penerima Manfaat (KPM), besaran dan penggunaan bantuan langsung tunai oleh KPM di desa mandiri, serta memberikan rekomendasi strategi yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas bantuan langsung tunai. Teori Efektivitas Makmur (2010; 7)	<i>Sequential Mixed Method</i> yaitu metode kuantitatif yang kemudian dilanjutkan dengan metode kualitatif.	Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai melalui Dana Desa (BLT DD) Desa Mandiri Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan dapat terlaksana dengan baik karena proses pelaksanaan penyaluran BLT DD telah berjalan maksimal berdasarkan dasar hukumnya. Tetapi dalam pengaturan mengenai mekanisme penyaluran khususnya ketepatan waktu penyaluran BLT tidak sesuai jadwal. Selain itu masih terdapat desa yang belum menyelesaikan kegiatan sehingga pencairan dana tahap selanjutnya terhambat.

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pasca Covid-19				
12.	Asmi Hariati, Safrul Rijali “Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bagi Masyarakat Miskin yang Terdampak Covid-19 di Desa Kupang Nunding Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong” <i>JAPB : Volume 6 Nomor 2, 2023</i>	Mengetahui dan menganalisa Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) dalam menanggulangi kemiskinan akibat Covid-19 di Desa Kupang Nunding Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong. Teori Efektivitas Duncan dalam Steers (2003) Efektivitas Organisasi	Deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi; observasi, dokumentasi dan angket. Teknik Pengambilan Sampel, yaitu <i>Simple Random</i> tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Adapun Jumlah Populasi Penelitian yang digunakan berjumlah 45 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan Teknik Analisis statistic sederhana menggunakan persentase (%).	Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Kupang Nunding Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong dikategorikan efektif dengan range tabulasi 73,8%.
13.	Ni Kadek Astri Winanti, Gayatri “Efektivitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19”	Menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat pada efektivitas pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.	Kuantitatif asosiatif. Sampel yang dipakai untuk penelitian ini berjumlah 119 orang perangkat desa. Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode <i>non-</i>	Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan pada efektivitas pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana. Ini menandakan bahwa semakin baik akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat yang

	<i>E-Jurnal Akuntansi Vol 33 No 9 September 2023</i>	Teori Kebijakan Publik Keagenan (Dewi & Gayatri, 2019).	<i>probability sampling</i> dengan teknik <i>purposive sampling</i> . Data dikumpulkan dengan metode kuesioner. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa uji regresi.	diterapkan oleh pemerintah desa terhadap pengelolaan BLT-DD, maka semakin baik pula efektivitas pengelolaan BLT-DD yang dihasilkan di 12 desa di wilayah Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem.
14.	Rismaya Elly Safitri, Galih Wahyu Pradana. “Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Keluarga Penerima Manfaat (Studi pada Desa Turi Kabupaten Magetan)” <i>Publika. Volume 11 Nomor 2, Tahun 2023</i>	Mengetahui tingkat efektivitas penyaluran BLT-DD bagi Keluarga Penerima Manfaat di Desa Turi, Kabupaten Magetan. Teori Efektivitas (Makmur, 2015)	Deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah KPM BLT-Dana Desa di Desa Turi sejumlah 147 KPM dengan sampel sejumlah 108 KPM yang dipilih menggunakan rumus Slovin. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan observasi. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dengan tujuh indikator efektivitas, yaitu ketepatan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan menentukan pilihan, ketepatan berpikir, ketepatan melakukan perintah, ketepatan menentukan	Keseluruhan proses penyaluran BLT-Dana Desa di Desa Turi sudah berjalan sangat efektif dengan tingkat efektivitas 83,02%. Indikator ketepatan waktu mendapat persentase skor jawaban sebesar 90% (Sangat Efektif), indikator ketepatan perhitungan biaya mendapat persentase skor jawaban sebesar 90% (Sangat Efektif), indikator ketepatan dalam menentukan pilihan mendapat persentase skor 89,44% (Sangat Efektif), indikator ketepatan berpikir mendapat persentase skor jawaban 87,41% (Sangat Efektif), indikator ketepatan dalam menentukan tujuan mendapat persentase skor jawaban 81,71% (Sangat Efektif). Dari tujuh

			tujuan, dan ketepatan sasaran.	indikator, ada dua indikator yang masuk kategori Cukup Efektif yaitu indikator ketepatan melakukan perintah (69,35%) dan ketepatan sasaran (61,81%).
Dampak atau Pengaruh Program Bantuan Langsung Tunai				
15.	Nandya Indah Hapsari, Bambang, Lita Apriyani, Farid Alfariy.	1. Menganalisis ketepatan program BLT Dana Desa dalam mencapai sasaran dan 2. Menganalisis karakteristik kebijakan program BLT Dana Desa di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden, dan 3. Menganalisis efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden.	Kuantitatif deskriptif. Pengumpulan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner. Jumlah responden terdiri dari 65 Keluarga Penerima Manfaat. Teknik analisis data menggunakan metode berupa teknik proporsi data, <i>Benefit Incidence Analysis</i> (BIA), dan Efektivitas Program	Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Rempoah sudah tepat sasaran dan berpihak pada masyarakat miskin. Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Rempoah tergolong program yang efektif. Namun dalam pelaksanaannya masih ada kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke atas yang menerima bantuan tersebut oleh karena itu pemerintah desa diharapkan terus konsisten melakukan uji tuntas terhadap keluarga penerima manfaat agar program bantuan yang diberikan dapat dialihkan kepada warga lain yang membutuhkan.
16.	Rizky Subhan, Junaidy, Dewi Merdayanty	Mengetahui pengaruh dari efektivitas bantuan	<i>Descriptive Quantitative</i> . Subyek dari penelitian ini	Terdapat pengaruh efektivitas bantuan langsung tunai terhadap

	<i>“The Effectiveness Of Direct Cash Assistance Of Village Funds On Community Welfare In Martapura District, Banjar District, South Kalimantan”</i> <i>Educational Journal of History and Humanities, 6 (3), 2023</i>	langsung tunai dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Teori Efektivitas Makmur	adalah para penerima dana bantuan langsung tunai, yang terdiri dari 1.787 orang. Berdasarkan rumus slovin dengan taraf kepercayaan 10%, sampel terdiri dari 96 orang. Pengambilan sampel menggunakan proportionate area random sampling. Penelitian ini menggunakan kuesioner, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan analisa data penelitian ini menggunakan uji hipotesis regresi linier sederhana.	kesejahteraan masyarakat dengan nilai sig 0,000 serta besarnya pengaruh sebesar 39,6% variabel efektivitas bantuan langsung tunai terhadap kesejahteraan masyarakat.
17.	Wilya Achmad <i>“Direct Cash Assistance Is a Solution Or a New Problem Of Poverty”</i> <i>Nautical Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 2 No 12 2024 : 2829-7466</i>	Mengetahui efektivitas dan dampak bantuan langsung tunai sebagai strategi penanggulangan kemiskinan.	Kualitatif deskriptif. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, majalah dan laporan penelitian sebelumnya	Bantuan Langsung Tunai (BLT) mempunyai peran penting dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat rentan dan membutuhkan. Program ini memberikan dukungan finansial langsung kepada mereka yang terpinggirkan secara ekonomi, seperti kelompok masyarakat miskin. Namun program BLT juga menimbulkan beberapa risiko yang

				perlu diperhatikan seperti ketergantungan yang berlebihan terhadap bantuan tersebut, lemahnya monitoring dan evaluasi yang ketat, serta potensi risiko inflasi menjadi tantangan yang harus diatasi agar program ini dapat memberikan dampak yang lebih berkelanjutan dalam penanggulangan kemiskinan
--	--	--	--	--

Ikhtisar penelitian terdahulu sangat berguna untuk menganalisis dan memperkaya pembahasan penelitian yang akan dilakukan dan sangat penting untuk membedakan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian terdahulu agar terhindar dari plagiasi karya ilmiah. Berdasarkan uraian di atas, penulis merujuk pada publikasi dalam dan luar negeri untuk menarik kesimpulan tentang efektivitas pemberian bantuan langsung tunai kepada daerah yang terkena dampak wabah COVID-19. Penelitian ini berbeda jauh dengan penelitian lainnya karena dilakukan di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dengan mencermati dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas, BLT dan metode pendistribusiannya dari dana desa ke daerah yang terkena dampak COVID-19.

1.6.2 Administrasi Publik

1.6.2.1 Definisi Administrasi Publik

Administrasi adalah proses manajerial untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya suatu organisasi guna mencapai tujuannya, sedangkan administrasi publik merupakan kegiatan yang menyangkut kepemimpinan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan didasari oleh teori birokrasi atau administrasi di suatu negara. Melihat definisi yang diajukan oleh banyak spesialis dapat membantu menjelaskan hakikat administrasi. Beberapa definisi ini meliputi: (Anggara, 2012: 21)

- 1) Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, administrasi memerlukan koordinasi dan pengarahannya sarana yang tersedia (John M. Pliffner).

- 2) Setiap perusahaan yang dipimpin manusia, baik sektor publik maupun swasta, dari toko-toko kecil hingga perusahaan besar, melalui beberapa jenis prosedur administratif (Leonard D. White).
- 3) Menurut Sondang P. Siagian, kata “administrasi” meliputi setiap usaha yang dilakukan sekelompok orang secara logis untuk mencapai serangkaian tujuan.
- 4) Setiap kali sejumlah individu bekerja sama menuju tujuan yang sama, ada proses administratif yang sedang berlangsung (The Liang Gie).

Terdapat tiga fungsi utama di setiap tingkatan umum pada proses administrasi dilaksanakan dalam struktur formal, yaitu; tingkat atas (fungsi pengarahan organisasi), tingkat menengah (fungsi manajemen organisasi), dan tingkat bawah (fungsi pengawas). Ketiga ketiganya hirarki di atas saling berkaitan, dan mempunyai kedudukan yang saling berelasi secara positif dan memiliki tugas yang berlainan pula.

1.6.2.2 Paradigma Administrasi Publik

Perubahan pada model atau paradigma merupakan indikator yang baik tentang sejauh mana pemahaman kita telah berkembang. Keyakinan yang dianut komunitas ilmiah tentang sudut pandang, metodologi, prinsip dasar, atau pendekatan tertentu dalam menangani masalah disebut paradigma (Kuhn 1970, dalam Keban: 32, 2008). Keyakinan dan karisma akan bergeser atau berkurang jika sudut pandang tersebut ditantang secara eksternal dan mengalami turbulensi. Paradigma baru, atau sudut pandang yang semakin sinkron, muncul seiring dengan adopsi masyarakat.

Ada kriteria untuk disiplin ilmu, yang mencakup penggabungan penekanan dan lokus, dan telah ada beberapa iterasi untuk menyatukan yang lama dan modern dalam kaitannya dengan ilmu administrasi publik sebagai sebuah peradaban. Pertanyaan tentang prinsip ilmiah yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah, area atau teknik yang digunakan, dan sebagainya adalah contoh pertanyaan fokus, sedangkan lokus mengover lapangan atau medan tata cara tersebut diterapkan. (Nicholas Henry, 1995 dalam Keban 2008) menyatakan bahwa pernah terjadi lima paradigma dalam administrasi negara, yaitu:

Paradigma I. Paradigma dikotomi politik dan administrasi (1900-1926). Paradigma ini mengungkapkan bahwa politik berfokus pada kebijakan atau tuntutan dari kehendak rakyat, sedangkan administrasi berfokus pada implementasi kebijakan.

Paradigma 2. Paradigma Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937). Fokus paradigma ini adalah prinsip manajemen seperti (POSDCORB). Prinsip tersebut dapat diterapkan secara universal dimana saja. Jadi paradigma ini menekankan pada fokusnya dari pada lokusnya.

Paradigma 3. Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970). Dalam paradigma ini nilai-nilai administrasi publik tidak bisa berlaku di mana saja karena selalu dipengaruhi oleh kaidah-kaidah tertentu. Di sinilah terjadi perdebatan mengenai pandangan tentang nilai-nilai administrasi publik dengan nilai-nilai politik.

Paradigma 4. Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970). Pada paradigma ini prinsip manajemen pada paradigma sebelumnya dipelajari dan didalami secara ilmiah. Dimana fokusnya perilaku organisasi, analisis manajemen, dsb. Paradigma ini berkembang dengan dua arah orientasi, yaitu berorientasi pada perkembangan ilmu administrasi publik, dan berorientasi pada kebijakan publik. Fokus paradigma ini hanya dapat dikembangkan pada organisasi bisnis sehingga lokusnya menjadi tidak jelas.

Paradigma 5. Paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-sekarang). Pada paradigma ini lokus dan fokusnya sudah jelas dimana yang menjadi fokusnya yaitu teori organisasi dan manajemen, dan kebijakan publik. Sementara untuk lokusnya masalah dan kepentingan publik.

1.6.3 *Good Governance*

1.6.3.1 Hakikat *Good Governance*

"Pemerintah" dan "tata kelola" sering dianggap memiliki definisi yang sama dalam kamus; keduanya menggambarkan proses di mana sebuah lembaga, bangsa, atau organisasi menjalankan kekuasaannya. Satu hal lain yang disebut badan pemerintahan suatu negara adalah pemerintah. Sebagaimana dinyatakan oleh Efendi (2012: 113)

"Pengarahan dan administrasi yang berwenang atas urusan laki-laki/perempuan dalam bangsa, negara bagian, kota, dll." adalah definisi bahasa Inggris dari "pemerintah." Atau, dalam bahasa Indonesia, itu menunjukkan pengarahan dan administrasi yang disetujui dari suatu bangsa, negara bagian,

kota, dll. Itu juga dapat merujuk pada entitas yang bertanggung jawab untuk menjalankan negara, negara bagian, atau kota, atau organisasi yang mengoordinasikan administrasi badan tersebut (Sedarmayanti, dalam Jeddawi, 2008).

Government (dalam bahasa Inggris) merujuk pada "tindakan, fakta, cara memerintah", yaitu perilaku, prosedur, pola, dan kegiatan yang membentuk pemerintahan. Menurut Kooiman, 1993 (Sedarmayanti dalam Jeddawi 2008), Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola lebih merupakan jaringan proses sosial-politik yang saling berhubungan, di mana negara dan warga negaranya terlibat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan publik dan kepentingan masyarakat.

Pemerintahan hanyalah salah satu dari beberapa makna yang melekat pada kata "tata kelola," yang juga mencakup manajemen, administrasi, pengarahan, dan bimbingan pelaksanaan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika konsep-konsep seperti tata kelola publik, tata kelola swasta, dan lain-lain muncul. Kata "tata kelola" menjadi populer sebagai konsep dan alat bagi pemerintahan, dan "tata kelola yang baik" menggambarkan bentuk ideal dari kegiatan ini. (Sedarmayanti, dalam Jeddawi 2008).

Manajemen pemerintahan yang baik merupakan definisi paling umum dari tata kelola yang baik. Yang dimaksud dengan "baik" di sini adalah taat pada aturan yang sejalan dengan apa yang dianggap sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. Efendi, 2012 berpendapat bahwa tata kelola pemerintahan yang baik

pada hakikatnya berupaya menciptakan kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan atau pelayanan publik secara seimbang melalui kerja sama semua komponen pelaku, termasuk sektor swasta, lembaga masyarakat, masyarakat sipil, dan negara.

Beberapa ahli teori dan praktisi negara Indonesia telah mengambil istilah "tata kelola pemerintahan yang baik" dan mempersempitnya menjadi "pemerintahan yang bersih," sementara yang lain menggunakannya untuk konsep yang lebih umum seperti "tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab" (LAN), "pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang dapat dipercaya", atau "tata kelola pemerintahan yang baik" (UNDP). Bagaimana kekuasaan publik, ekonomi, dan administrasi suatu negara diatur adalah tempat perbedaan yang paling mencolok antara "pemerintah" dan "tata kelola pemerintahan". Gagasan tentang pemerintahan adalah bahwa ia harus memainkan peran yang lebih sentral dalam mengoordinasikan beberapa cabang kekuasaan. Tata kelola, di sisi lain, mencakup cara suatu negara untuk mendistribusikan wewenang, mengelola sumber daya, dan menangani masalah-masalah sosial. Secara sederhana. Dalam konsep tata kelola pemerintahan terkandung prinsip-prinsip demokrasi seperti pemerataan, keterbukaan, partisipasi, kerja sama, supremasi hukum, dan transparansi (Efendi, 2012: 113-114).

Untuk memunculkan frasa "tata kelola pemerintahan yang baik", Dwipayana dan Eko (dalam Widodo 2001) mengusulkan tata kelola pemerintahan sebagai gagasan apolitis yang dapat digunakan untuk menciptakan model-model yang bermanfaat. Pemerintah yang menetapkan dan memanfaatkan konsep-konsep

profesionalisme, akuntabilitas, keterbukaan, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan penerimaan masyarakat dicirikan oleh tata kelola pemerintahan yang baik (Anggara, 2012: 189). Menurut Sedarmayanti (2012: 2), istilah "tata kelola pemerintahan yang baik" mengacu pada metode yang paling efektif untuk mengoordinasikan penggunaan sumber daya pemerintah guna menyediakan layanan dan komoditas penting bagi warga negara.

Kekuasaan publik, ekonomi, dan administratif dalam kaitannya dengan pengelolaan negara merupakan bahasa tata pemerintahan yang baik, menurut Muhathir (dalam Jeddawi 2008). Ini mencakup sistem, prosedur, koneksi, dan lembaga yang rumit yang melibatkan anggota masyarakat dalam pengelolaannya untuk kepentingan publik. Lembaga yang melibatkan kepentingan publik diperlukan agar tata pemerintahan yang efektif dapat terwujud. (LAN 2000 dalam Astomo, 2014) *Good governance* mengandung dua pemahaman, yaitu:

- a. Harkat atau kaidah yang mendukung tinggi kemauan masyarakat dan kaidah-kaidah yang bisa memajukan kemahiran rakyat dalam meraih tujuan yang di amanatkan dalam konstitusi negara.
- b. Perspektif peran dari pemerintah dalam melakukan pengupayakan efektif dan efisien untuk meraih tujuan nasional.

Tata kelola pemerintahan yang baik berorientasi pada:

- a. Pencapaian tujuan nasional yang telah diarahkan oleh negara.
 - b. Pemerintahan yang efisien dan efektif dalam mencapai tujuan negara
- (LAN 2000 dalam Astomo, 2014).

Menurut World Bank (dalam Astomo, 2014) *good governance* pada awalnya lebih menekankan pada keterbukaan dan pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi, kebijakan profesionalisme dan manajemen kapabilitas dan penggunaan dengan efektif sumber daya untuk mencapai perbaikan tingkat pembangunan sosial ekonomi.

Adapun Menurut Lembaga Administrasi Negara (dalam Astomo, 2014) pemerintahan yang baik adalah proses pelaksanaan kekuasaan negara dalam menyelenggarakan dan menyediakan barang dan jasa publik. Efisiensi dan keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan kewajiban dan fungsinya dalam mencapai tujuan dapat dievaluasi dengan cara ini. Oleh karena itu, diperlukan banyak pelaku, jaringan, dan organisasi nonpemerintah untuk menangani masalah dan kebutuhan publik secara efektif dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu karakteristik yang utama adalah efektivitas, sebab efektivitas merupakan salah satu prinsip-prinsip *good governance* dan bentuk keberhasilan pemerintah dalam membuat kebijakan publik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan apakah kebijakan tersebut sudah sesuai antara *output* dan *outcome*.

1.6.3.2 Prinsip-prinsip *Good Governance*

Sebagai badan utama penyelenggaraan pemerintahan yang baik di tingkat daerah, pemerintah daerah harus mengikuti dan berpedoman pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. *United Nation development Programme (UNDP)*,

(dalam Efendi 2012). mengajukan beberapa karakteristik *Good Governance* antara lain sebagai berikut:

- a) Partisipasi. Partisipasi merupakan keterlibatan pihak-pihak atau seluruh unsur dalam suatu organisasi dalam meraih tujuan yang telah digariskan, hal ini sangat berpengaruh kepada keberlangsunga organisasi karena partisipasi dapat bisa mengatasi persoalan organisasi. Apalagi melihat kondisi negara kita yang sekarang sangat membutuh kan partisipasi dan kejasama antara pemerintah swasta dan masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah digariskan.
- b) Penegakan Hukum. Dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik hukum merupakan salah satu prinsip yang sangat penting sebab dalam menjalankan segala tindakan atau kegiatan yang bersifat kenegaraan selalu ada landasan hukum yang mengatur. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen agar tidak terjadi penyelewengan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- c) Transparansi. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah dituntut untuk selalu bersikap terbuka terhadap segala tindakan yang dilakukannya, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terutama hal yang terkait dengan bidang kebijakan guna memajukan kualitas dan kuantitas pemerintahan.
- d) Responsif. Aspek penting dalam perwujudan pemerintahan yang baik adalah responsif lembaga-lembaga pemerintah dalam menanggapi persoalan-

persoalan dan tuntutan-tuntutan masyarakat mengenai kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat.

- e) **Konsensus.** Bagian yang penting dalam *good governance* adalah penyesuaian arah dan tujuan dalam melaksanakan tugas-tugas untuk pengambilan keputusan dalam organisasi harus melalui musyawarah dan kesepakatan bersama.
- f) **Akuntabilitas.** Asas akuntabilitas berarti seluruh kegiatan, perbuatan, tanggung jawab serta sikap-sikap pemerintah yang dipertanggung jawabkan terhadap seluruh aspek tugas, kewenangan dan fungsinya dalam menyelenggarakan pemerintahan tersebut dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
- g) **Visi Strategi.** Visi strategi adalah dugaan-dugaan yang berguna untuk menangani perubahan-perubahan yang ada pada saat ini maupun pada masa yang akan datang karena perubahan tersebut akan sangat berguna bagi pemerintah dalam meramalkan kepentingan untuk membuat keputusan nantinya di masa yang akan datang.
- h) **Efektifitas dan Efisiensi.** Efektifitas dan efisien bukanlah hal yang sama kebanyakan orang menganggap sama. Efektifitas berarti sejauh mana lembaga atau organisasi menciptakan sesuatu yang berdaya guna dan berhasil guna, hal ini dapat diukur dari barang dan jasa yang dihasilkan untuk kepentingan organisasi. Namun, efisiensi mengacu pada ketepatan organisasi dalam menjalankan program dan tujuan yang telah ditetapkan dengan benar dan akurat..

1.6.4 Efektivitas Program

1.6.4.1 Definisi Efektifitas Program

Efektif adalah ejaan varian dari kata bahasa Inggris *effective*, yang berarti berhasil dan dieja dengan benar. Sesuatu dikatakan efektif jika dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Seberapa baik hasil aktual sesuai dengan tujuan yang direncanakan adalah tolok ukur keberhasilan. Efektivitas suatu organisasi dapat diukur dari seberapa baik organisasi tersebut memenuhi tugasnya untuk mencapai tujuan bersama sesuai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Gibson (dalam Maun, 2020) menyatakan bahwa efektivitas dicapai melalui upaya bersama.

Kita dapat menyatakan bahwa efektivitas didefinisikan sebagai pencapaian tujuan karena tingkat pencapaiannya merupakan ukuran efektivitas. Tidak mengherankan bahwa suatu program sangat penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuannya. Arikunto mendefinisikan program sebagai tindakan organisasi yang melibatkan sekelompok orang yang beroperasi dalam suatu proses dan berkelanjutan, dengan tujuan untuk melaksanakan dan mencapai suatu kebijakan (2004: 2). Pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional merupakan salah satu aspek penting yang memerlukan waktu dan berlangsung dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang, sedangkan program merupakan penjabaran atau perincian dari tujuan tersebut.

Organisasi dan bisnis menggunakan efektivitas sebagai tolok ukur untuk mengukur seberapa baik kegiatan dan inisiatif yang direncanakan berjalan. Apabila tujuan dan sasaran organisasi terlaksana secara efektif maka organisasi

tersebut dapat dikatakan efektif. Salah satu cara untuk mengukur efisiensi adalah dengan membandingkan hasil dengan sasaran yang ditetapkan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau efektivitasnya, perlu dilakukan perbandingan antara ketepatan dengan kesalahan atau prosedur yang dilakukan. Dengan sedikit kesalahan, setiap tugas dapat terlaksana dengan tepat sesuai rencana (Makmur, 2015 dalam Safitri dkk 2023).

Efektivitas program dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang menunjukkan kesesuaian antara harapan dengan hasil yang diharapkan, apabila tindakan yang dilakukan dengan kemampuan operasional sesuai dengan target yang telah ditetapkan (Makmur, 2015). Kekuatan dan tanggung jawab kelompok tercermin dalam keberhasilan program, yang merupakan hasil dari rencana target kelompok. Monterio (2019:295) menjelaskan bahwa suatu organisasi, program atau aktivitas dievaluasi efektif jika yang didapatkan mampu memenuhi tujuan yang diharapkan.

1.6.4.2 Ukuran atau Indikator Efektifitas Program

Menilai efektivitas suatu program perlu dilakukan agar dapat mengetahui sejauh mana dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut karena efektifnya suatu program merupakan gambaran keberhasilan organisasi dalam tercapainya sasaran yang telah ditetapkan, sehingga melalui pengukuran efektivitas ini dapat menjadi pertimbangan mengenai program tersebut. Untuk mengukur efektivitas program menurut Sutrisno, 2007 mengidentifikasi hasil

studi para ahli mengenai ukuran efektivitas program didalam sebuah organisasi, yaitu:

- 1) Pemahaman program, dilihat dari sejauhmana masyarakat dapat memahami kegiatan program;
- 2) Tepat Sasaran, dilihat dari apa yang diinginkan tercapai atau menjadi kenyataan;
- 3) Tepat Waktu, dilihat dari sejauhmana program bisa mempengaruhi penggunaan waktu dalam pelaksanaan pelayanan;
- 4) Tercapainya Tujuan, diukur dengan melalui pencapaian tujuan program yang telah dijalankan;

Perubahan Nyata, diukur dengan melalui sejauhmana program tersebut mampu memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat.

Budiani (dalam Ririn, 2021) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi berjalan atau tidaknya suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel- variabel berikut ini:

- 1) Ketepatan Sasaran Program, yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.
- 2) Sosialisasi Program, yaitu kemampuan pelaksana program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada umumnya.
- 3) Tujuan Program, adalah sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan

program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

- 4) Pemantauan Program, merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Makmur dalam bukunya tentang Efektivitas Kebijakan Pengawasan dan Kelembagaan berpendapat bahwa ada beberapa indikator keberhasilan, efektivitas, yaitu:

- 1) Ketepatan penentuan waktu: dapat berpengaruh kepada seberapa efektif suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.
- 2) Ketepatan perhitungan biaya: ini dilakukan agar program tidak kekurangan dana atau anggaran sampai program tersebut selesai.
- 3) Ketepatan dalam pengukuran: ini berarti bahwa standarisasi harus diterapkan saat menjalankan program. Keefektifitasan program diukur dari ketepatan standar yang digunakan.
- 4) Ketepatan dalam menentukan pilihan: ini adalah tindakan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan karena menentukan pilihan menggabungkan proses yang sangat penting untuk mencapai efektivitas.
- 5) Ketepatan berpikir dapat menentukan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- 6) Ketepatan dalam melakukan perintah: ini adalah tindakan yang dilakukan oleh organisasi atau individu yang dapat memberikan instruksi dengan cara yang jelas dan mudah difahami.
- 7) Ketepatan dalam menetapkan tujuan: tujuan yang tepat akan membantu melakukan tugas dengan efektif.

- 8) Ketepatan sasaran: dapat menentukan apakah tindakan seseorang atau organisasi berhasil mencapai tujuan.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa efektivitas merupakan konsep yang krusial untuk dipahami oleh suatu program. Efektivitas menunjukkan seberapa baik program tersebut dalam mencapai sasarnya, atau dengan kata lain mengukur seberapa baik aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target awal. Teori yang dikemukakan oleh Makmur dalam bukunya “Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawas” digunakan dalam penelitian ini. Teori tersebut secara khusus membahas indikator Ketepatan Penentuan Waktu dan Ketepatan Pengukuran, yaitu kuantitas penerimaan BLT, yang digunakan sebagai variabel bebas (X1 dan X2). Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan teknik kuantitatif asosiatif. Oleh karena itulah teori ini akan menjadi dasar penelitian tentang variabel-variabel yang mempengaruhi efisiensi program bantuan langsung tunai Dana Desa.

1. Ketepatan Waktu Penerimaan (X1)

Ketepatan waktu penerimaan merupakan salah satu cara untuk mengukur keberhasilan. Waktu merupakan faktor kunci yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu usaha dalam bisnis. Mencapai tujuan seseorang menjadi jauh lebih mudah jika seseorang mengetahui cara mengelola waktu dengan bijaksana. Waktu merupakan hal yang sangat penting saat mempersiapkan pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Seberapa baik suatu program mencapai tujuannya bergantung pada seberapa efisien waktunya digunakan.

2. Ketepatan dalam Pengukuran / Besaran Penerimaan (X2)

Ketepatan dalam pengukuran berarti bahwa standarisasi dalam menjalankan program harus diterapkan karena keefektifitasan program diukur dengan ketepatan standar yang digunakan. Dalam konteks program bantuan langsung tunai dana desa ketepatan dalam pengukuran ini berarti sejauh mana program tersebut memberikan dampak atau hasil yang nyata. Ini mencakup ukuran atau indikator yang digunakan untuk mencapai pencapaian tujuan program. Besaran ukuran dalam program bantuan langsung tunai dana desa dapat bervariasi tergantung pada kebijakan pemerintah, skala program, dan tujuan spesifik dari program tersebut.

Pada penelitian ini ketepatan dalam pengukuran penulis fokuskan pada jumlah besaran yang diterima oleh masing-masing Penerima Manfaat BLT Dana Desa.

1.6.5 Ekonomi Keluarga

1.6.5.1 Definisi Ekonomi Keluarga

Ekonomi adalah bidang yang pada dasarnya mempelajari bagaimana manusia menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan tidak terbatas akan barang dan jasa (Parhusip, 2022)..

Sastradipoera (dalam Parhusip, 2022) mengatakan bahwa istilah "ekonomi" berasal dari bahasa Yunani "Oikonomia", yang berarti manajemen urusan, rumah tangga, terutama penyediaan dan administrasi pendapatan. Di sini, Sastradipoera lebih berkonsentrasi pada masalah rumah tangga dan berkonsentrasi pada

pendapatan dan tanggungan keluarga. Dalam situasi ini, pendapatan dan tanggungan keluarga tampaknya memegang peranan penting dalam peristilahan perekonomian, terutama ekonomi keluarga.

Dalam Parhusip, 2022 dijelaskan bahwa ada tiga masalah utama yang menjadi subjek penelitian ilmu ekonomi, di antaranya:

- a. Produksi adalah proses meningkatkan kegunaan suatu produk, yang membutuhkan alat-alat yang disebut produksi.
- b. Dalam hal distribusi pendapatan, distribusi mengacu pada fakta bahwa pendapatan yang diterima oleh masyarakat akan memberi mereka kemampuan untuk membeli barang-barang yang diperlukan untuk kebutuhan hidup.
- c. **Konsumsi** adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk mencukupi kebutuhan hidup, tergantung pada pendapatan yang diperoleh.;

Keluarga terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang belum menikah, dan biasanya disebut rumah tangga. Rumah tangga adalah bagian terkecil dalam masyarakat dan berguna sebagai wadah untuk cara pergaulan hidup.

Uraian diatas menjelaskan ekonomi keluarga adalah suatu kajian tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam keluarga oleh seseorang.

1.6.5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Konsumsi Ekonomi Keluarga

Secara umum, hal-hal berikut mempengaruhi pola konsumsi keuangan keluarga:

- a. Pendapatan. Pendapatan Menurut Ramlan, 2006 (dalam Hanum 2018), pendapatan yang dibagi menjadi dua bagian: pendapatan bersih dan pendapatan kotor. Menurut Fadillah, 2014 (dalam Hanum, 2018), tingkat kesejahteraan rumah tangga dan pengeluaran konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan rumah tangga.
- b. Pendidikan. Buhang, 2015 (dalam Hanum, 2018) menyatakan bahwa pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan sangat bergantung pada pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin banyak uang yang mereka keluarkan untuk konsumsi, yang berdampak pada pola konsumsi dan menghasilkan hal yang positif. Pendidikan tinggi meningkatkan kebutuhan hidup. Kondisi ini terjadi karena mereka harus memenuhi banyak kebutuhan selain makanan dan minuman. Mereka juga membutuhkan informasi, berinteraksi dengan orang lain, dan mendapatkan pengakuan orang lain tentang keberadaannya.
- c. **Family Size (Jumlah Tanggungan Keluarga) (X3).** Menurut Halim, 2005 (dalam Hanum, 2018), tanggungan adalah seseorang yang masih berhubungan dengan keluarga sepanjang hidupnya. Jumlah tanggungan adalah jumlah jiwa yang masih menempati satu rumah dengan kepala rumah tangga dan masih bertanggung jawab atas kebutuhan setiap hari rumah

tangga. Menurut Lestari (2016), jumlah anggota rumah tangga dalam suatu keluarga dapat berdampak pada tingkat penggunaan kebutuhan yang harus disediakan oleh rumah tangga yang bersangkutan..

Pada penelitian ini *Family Size* akan dijadikan sebagai variabel independen (X3) sebab *Family Size* sangat mempengaruhi kebutuhan keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya bulannya semakin tinggi jumlah tanggungan keluarga maka semakin banyak pula tingkat kebutuhan dari keluarga tersebut. Hal ini tentu sangat mempengaruhi tingkat efektivitas dari program BLT-DD sebab jika dibandingkan antara Besaran Penerimaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dengan *Family Size*.

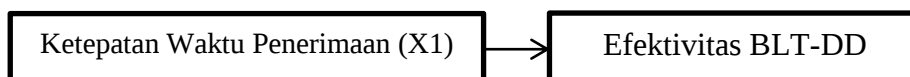
1.7 Hipotesis

Menurut Bambang, 2005 (dalam Lady Marietha, 2019) hipotesis adalah asumsi atau dugaan sementara yang akan diuji kebenarannya, atau suatu tanggapan sementara atas pernyataan-pernyataan penelitian. Pada riset kuantitatif terdapat dua macam hipotesis yaitu hipotesis satu variabel dan kausal.

1.7.1 Hipotesis Verbal

1.7.1.1 Hipotesis Minor

1. Ada kemungkinan bahwa Efektivitas BLT-DD di Kecamatan Pariangan Periode 2020-2021 dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh Ketepatan Penentuan Waktu (X1).



2. Efektivitas BLT-DD di Kecamatan Pariangan Periode 2020-2021 diduga dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh Ketepatan Pengukuran/ Besaran Penerimaan (X2)..

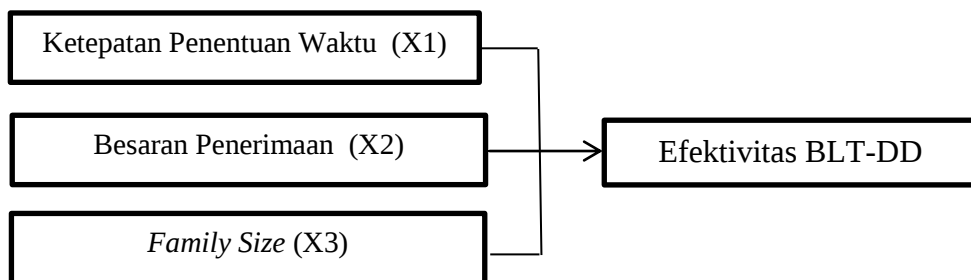


3. Ada kemungkinan bahwa Efektivitas BLT-DD di Kecamatan Pariangan Periode 2020-2021 dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh ukuran keluarga atau jumlah tanggungan keluarga (X3)..



1.7.1.2 Hipotesis Mayor

Efektivitas Program (BLT-DD) di Kecamatan Pariangan Periode 2020-2021 diperkirakan berpengaruh positif dan signifikan oleh Ketepatan Penentuan Waktu (X1), Ketepatan Pengukuran (X2), dan Ukuran Keluarga (X3).



1.8 Definisi Konsep dan Operasionalisasi Konsep

1.8.1 Definisi Konsep

Defenisi konseptual adalah rangkuman yang diluapkan dalam bentuk kumpulan kata ataupun kalimat. Dengan kata lain defenisi konseptual merupakan pengertian yang masih berbentuk konsep dan maknanya sangat ringkas.

- 1) Efektivitas Program (Y), adalah tingkat sejauh mana program tersebut mencapai tujuan-tujuannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di tingkat desa baik itu seperti usaha ataupun hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 2) Ketepatan Waktu Penerimaan (X1), adalah faktor penting dalam memastikan efektivitas karena penentuan waktu yang tepat dapat meminimalkan resiko penundaan dan memastikan bahwa bantuan diterima saat masyarakat sangat membutuhkan.
- 3) Ketepatan Besaran Penerimaan (X2) adalah sejauh mana program tersebut mencapai sasaran dan tujuan dengan tepat berdasarkan besaran ukuran dalam program, hal ini tergantung untuk apa saja besaran yang diterima itu dimanfaatkan oleh masing-masing Keluarga Penerima Manfaat.
- 4) *Family Size* (X3) adalah jumlah tanggungan kepala rumah tangga dalam mencukupi kebutuhan hidup setiap anggota rumah tangga, jika total anggota keluarga banyak maka makin tinggi juga tanggungan kepala keluarga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.

1.8.2 Operasionalisasi Konsep

Operasional konsep diartikan sebagai metode pengukuran variabel penelitian. Ada satu variabel dependen dan tiga variabel independen pada penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel X1, X2, dan X3 memengaruhi variabel Y. Mereka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Variabel Efektivitas (Y), (Sutrisno, 2007 dan David dkk, 2012) dengan indikator :**
 - a) Pencapaian tujuan
 - b) Kejelasan program
 - c) Tingkat kepuasan
 - d) Kriteria penerima BLT
2. **Variabel Ketepatan Waktu (X1) (Makmur, 2013), dengan indikator :**
 - a) Waktu Penyaluran
 - b) Keterlambatan atau Penyimpangan dari Jadwal
3. **Variabel Ketepatan Pengukuran (Besaran Penerimaan) (X2), (Makmur, 2013) dengan indikator :**
 - a) Jumlah Dana/ KPM
 - b) Pengurangan Tingkat Kemiskinan
 - c) Peningkatan Kesejahteraan
4. **Variabel *Family Size* (X3) (Lestari, 2016 dalam Hanum 2018)**
 - a) Jumlah Anggota Keluarga
 - b) Indeks Biaya Hidup

Operasionalisasi konsep pada penelitian ini dijelaskan dalam tabel berikut :

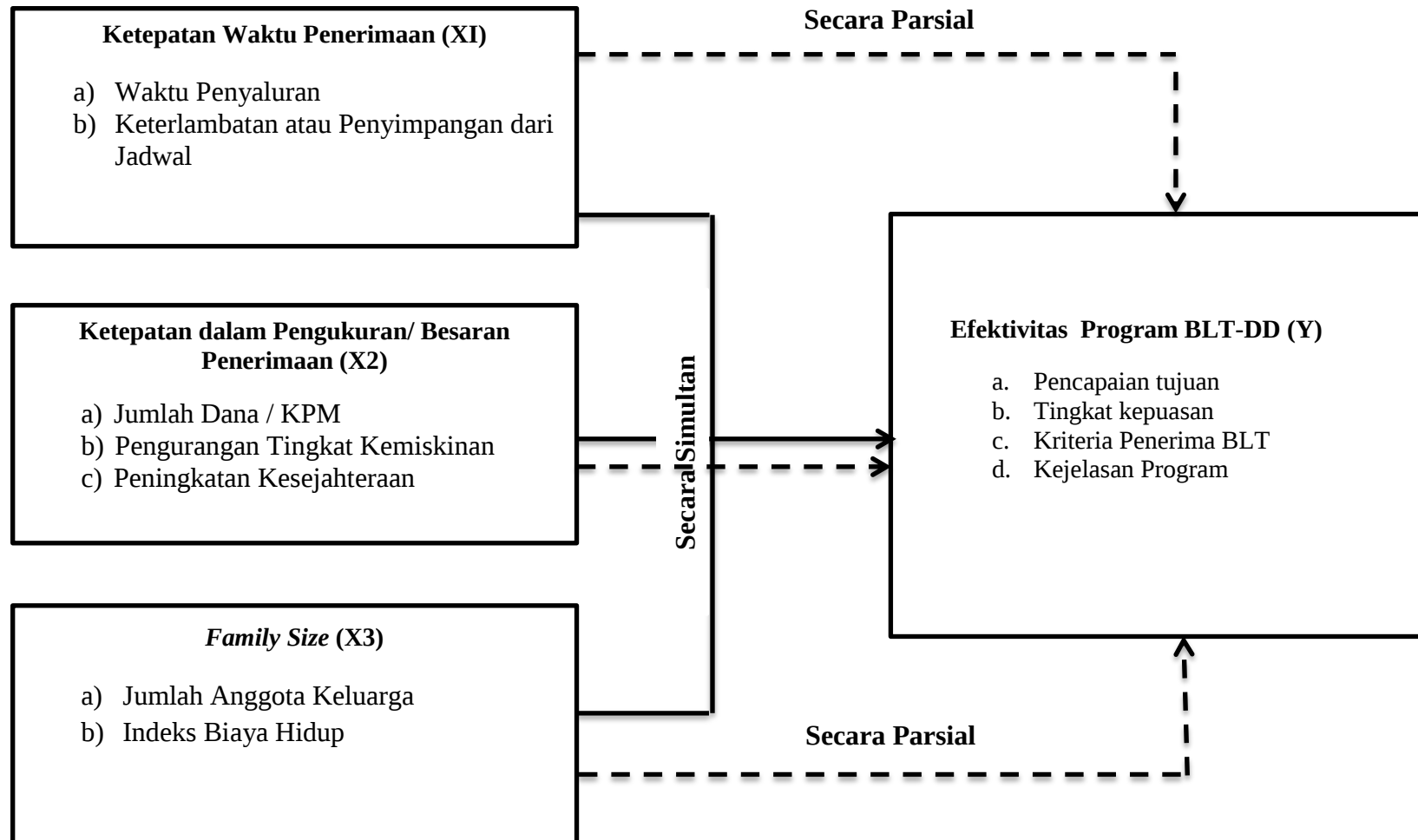
Tabel 1. 8 Operasional Konsep

No	Variabel	Tolok Ukur	Pernyataan
1.	Efektifitas	Pencapaian tujuan	1) Dalam menyalurkan BLT Dana Desa Apakah petugas pelaksana sudah mematuhi hukum dan peraturan berlaku?.

			2) Apakah BLT ini dapat meringankan beban ekonomi keluarga yang kesulitan akibat pandemik?
		Kejelasan Program	1) Informasi apa saja yang biasa diberikan oleh petugas terkait BLT? 2) Apakah alur mengurus BLT informasi yang diberikan oleh petugas pelaksana sudah lengkap dan mudah dimengerti masyarakat?
		Tingkat kepuasan	1) Apakah mekanisme pendistribusian BLT sudah melibatkan partisipasi masyarakat baik itu dukungan ataupun keterlibatan masyarakat secara langsung dalam menentukan penerima manfaatnya? 2) Apakah mekanisme BLT melibatkan pihak-pihak berikut: BPRN, KAN, Relawan Covid-19 serta Alim Ulama dan Cerdik Pandai?
		Kriteria penerima BLT	1) Apakah calon penerima bantuan ini layak/ tepat mendapatkan bantuan atau tidak? 2) Apakah yang berhak menerima BLT masyarakat yang berkategori (Tidak mendapat Non PKH, Non BPNT, Non Prakerja, kehilangan pekerjaan, Memiliki anggota keluarga yang rentan misalnya Kepala keluarga perempuan, lanjut umur, dan disabilitas)
2.	Ketepatan Penentuan Waktu	Waktu Penyaluran Bantuan	1) Apakah BLT dana desa diterima secara rutin? 2) Apakah penerimaan BLT secara triwulan sudah tepat?

		Keterlambatan atau Penyimpangan dari Jadwal	1) Apakah pencairan BLT sudah tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan? 2) Ketika BLT-Dana Desa yang Bapak/Ibu terima selama 3 bulan itu habis pada bulan pertama. Bagaimana cara bapak/ibu untuk mencukupi kebutuhan pokok dalam jangka waktu 2 bulan kedepan?
3.	Ketepatan dalam Pengukuran	Jumlah Dana / KPM	1) Apakah besaran yang bapak/ibu terima sebesar Rp. 600.000,-/ bulan sudah sesuai dengan jumlah yang ditetapkan pada aturan yang berlaku? 2) Dengan adanya besaran BLT-Dana Desa yang bapak/ibu terima setiap bulan sebesar Rp. 600.000,- yang diberikan 3 bulan sekali Apakah dapat untuk memenuhi kebutuhan pokok bapak/ ibu dalam dalam setiap bulannya?
		Pengurangan Tingkat Kemiskinan	Menurut bapak/ibu apakah BLT ini dapat mengurangi angka kemiskinan akibat pandemik?
		Peningkatan Kesejahteraan	Apakah menurut bapak/ibu pemberian BLT-DD ini berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga?
4.	Family Size	Jumlah Anggota Keluarga	Dalam kartu keluarga ini terdiri dari berapa anggota keluarga?
		Indeks Biaya Hidup	1) Apakah ketika Covid-19 kemaren BLT dapat membantu kebutuhan pokok bapak/ibu? 2) Apa saja sembako yang dijadikan sebagai prioritas dalam memenuhi kebutuhan pokok bulanan bapak/ ibu?

1.9 Kerangka Pemikiran



1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Berikut ini kategori-kategori penelitian terdiri dari: (Marietha, 2019)

- a. Penelitian eksploratif. Penelitian ini sifatnya menyusuri sebuah fenomena yang nisbi masih aktual. Apabila ada kejadian yang sudah lama tidak diketahui. Tujuan dari penelitian ini ialah menguraikan ide-ide pokok tentang tema yang baru dan memberikan fondasi terhadap penelitin selanjutnya.
- b. Penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan menyampaikan representasi dengan lebih detail tentang sesuatu fenomena. Di mana tipologi tentang gejala yang diteliti merupakan hasil akhir dari penelitian ini.
- c. Penelitian eksplanatif. Ialah penelitian yang dilakukan guna mendapatkan atau menjumpai penjelasan tentang sebab-sebab terjadinya suatu fenomena. Gambaran mengenai relasi sebab-akibat yang kerelasi dengan variabel penelitian merupakan hasil akhir dari penelitian ini.

Kategori peneltian yang diterapkan dalam riset ini yaiitu penelitian eksplanatif karena melakukan pembuktian hubungan antar variabel yang telah tentukan.

1.10.2 Populasi Dan Sampel

1.10.2.1 Populasi

Populasi ialah kelengkapan atau kebulatan unit yang dijadikan oleh lembaga pemerintah, organisasi, orang, sebagai pokok statistik untuk mengamati benda

ataupun objek. Populasi homogen adalah pupolasi yang diterapkan dalam penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini adalah penerima manfaat BLT di Kecamatan Pariangan.

1.10.2.2 Sampel

Sampel ialah separuh dari populasi yang dijadikan sebagai pokok penelitian guna meramalkan ciri-ciri suatu populasi. Bagian-bagian populasi yang digunakan dalam riset ini penerima manfaat Program BLT yang ada di Kecamatan Pariangan yang tersebar di enam Kenagarian, yaitu Batu Basa, Pariangan, Sawah Tengah, Simabur, Sungai Jambu dan Tabek.

1.10.2.3 Teknik Pengambilan Sampel

Secara umum ada dua cara dalam pengambilan sampel yaitu secara acak dan tidak acak, dengan mempertimbangkan hal tertentu. Dengan mempertimbangkan kelemahan dalam melakukan penelitian, maka akan diambil sampel dari seluruh populasi yang ada. Berikut cara menentukan sampel untuk penelitian (Sugiyono, 2012:91) :

- a. Dalam penelitian tolok ukur sampel yang layak, yaitu kisaran 30-500.
- b. Apabila sampel dikelompokkan dalam kriteria maka seluruh sampel minimal 30 setiap kriteria tersebut.

Populasi dalam penelitian ini terdiri enam kelompok, yaitu Nagari Batu Basa, Pariangan, Sawah Tengah, Simabur, Sungai Jambu dan Tabek. Teknik pengambilan sampel yang digunakan penelitian ini berdasarkan tujuan karena

yang menjadi subjek dari penelitian ini, yaitu keluarga penerima manfaat bantuan BLT-DD dan dihitung dengan rumus:

$$s = \frac{n}{N} \times S$$

Keterangan :

s : Jumlah sampel yang akan dicari

n : Jumlah populasi pada masing – masing unit populasi

N : Jumlah total populasi

S : Jumlah total sampel yang ditetapkan (30 sampel)

Berdasarkan rumus diatas, diperoleh jumlah sampel masing-masing unit populasi seperti pada tabel berikut :

Tabel 1.10.1 Jumlah Populasi dan Sampel

Unit Populasi	Populasi	$s = \frac{n}{N} \times S$	Jumlah Sampel
Batu Basa	147	147/ 686 X 30	6
Pariangan	116	116/ 686 X 30	5
Sawah Tengah	41	41/ 686 X 30	2
Simabur	112	112/ 686 X 30	5
Sungai Jambu	136	136/ 686 X 30	6
Tabek	134	67/ 686 X 30	6
Jumlah	686	Jumlah	30

Sumber : Data Primer telah diolah, 2024

1.10.3 Jenis Data

Jenis data yang terdapat pada penelitian adalah :

- a. Data kualitatif merupakan data uraian atau penjelasan yang mencakup ucapan, tulisan, dan tingkah individu yang sedang diteliti. (Trijono, 2015).
- b. Data kuantitatif merupakan jenis data yang diungkapkan melalui angka. Data semacam ini umumnya merupakan hasil dari transformasi data kualitatif yang menunjukkan perbedaan bertingkat. (Bungin, 2005).

1.10.4 Sumber Data

- a. Data primer ialah data yang diperoleh penulis secara langsung dengan cara turun kelapangan pada lokasi lokasi yang telah ditetapkan dalam penelitian.
- b. Data sekunder ialah data yang didapatkan secara studi literatur, termasuk penelitian yang telah dilakukan sebelumnya..

1.10.5 Skala Pengukuran

Rachmat Trijono (2015) menguraikan bahwa skala pengukuran merupakan suatu sistem yang menetapkan aturan untuk memberikan nilai numerik kepada elemen-elemen dalam proses pengukuran. Dalam teori statistika, terdapat istilah Tingkat Skala Ukur, yang merujuk pada suatu kondisi yang mencerminkan jumlah data yang terdapat di dalamnya.

Penelitian ini menggunakan skala likert sebagai alat ukur. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat serta untuk menentukan keputusan akhir dari setiap pernyataan yang diberikan kepada responden yang diambil dari Kecamatan Pariangan, dengan rentang skala empat.

Tabel 1.10.2 Rentang Skala

No	Rentang	Gradiasi	Keterangan
1	Skala 4	SS	Sangat Setuju
2	Skala 3	S	Setuju
3	Skala 2	TS	Tidak Setuju
4	Skala 1	STS	Sangat Tidak Setuju

Sumber : Data Primer telah diolah, 2024

1.10.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu tata cara yang dijadikan oleh peneliti dalam memperoleh data. Menurut Sugiyono (2012:224), teknik pengumpulan data merupakan metode yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Pada penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara (Interview)

Teknik Interview ialah teknik mengumpulkan data melalui tanya jawab kepada responden secara langsung maupun tidak langsung (Sugiyono, 2012). Pada penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung kepada Dinas Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, Wali Nagari (Batu Basa, Pariangan, Sawah Tengah, Simabur, Sungai Jambu dan Tabek), dan masyarakat setempat (mendapatkan BLT Dana Desa) yang dibantu dengan alat buku catatan dan kuesioner. Jenis-jenis teknik wawancara ada dua yaitu :

- a. Teknik wawancara terpimpin (terstruktur), merupakan sistem tanya jawab yang terarah dan berfokus dalam mengumpulkan data penelitian yang

relevan saja. Teknik wawancara ini menggunakan pedoman wawancara dan hal-hal yang akan ditanyakan secara rinci kepada responden.

- b. Teknik wawancara tidak terpimpin (tidak terstruktur), merupakan sistem tanya jawab yang tidak terarah. Peneliti akan menetapkan topik dan tujuan penelitian setelah dilakukannya wawancara. Akibatnya tidak efisien baik waktu, biaya dan tenaga peneliti.

Jenis teknik wawancara yang dilakukan peneliti merupakan teknik wawancara terpimpin (terstruktur), dimana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, sehingga peneliti dapat memperoleh info yang lebih akurat tentang proses dan mekanisme penyaluran BLT di Kecamatan Pariangan.

2. Observasi

Teknik observasi merupakan cara mendapatkan data melalui pengamatan dan mencatat terkait secara sistematis objek yang diteliti (Sugiyono, 2012). Observasi dilakukan peneliti untuk mengetahui bagaimana cara penyaluran BLT Dana Desa di Kecamatan Pariangan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data melalui catatan peristiwa yang telah berlalu (Sugiyono, 2012). Pada penelitian ini, dokumentasi sebagai sumber data yang dimanfaatkan dalam menguji, menjelaskan dan meramalkan fenomena

yang diteliti, yakni efektivitas penyaluran BLT Dana Desa di Kecamatan Paringan.

1.10.7 Instrumen Penelitian

Instrumen adalah perangkat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Ketepatan Waktu Penerimaan, Besaran Penerimaan dan *Family Size* terhadap Efektifitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kecamatan Paringan” ini memiliki empat instrumen yaitu: instrumen untuk mengukur efektivitas, ketepatan waktu, besaran penerimaan, dan *family size*. Keempat instrumen tersebut dalam bentuk daftar pertanyaan atau kuesioner yang terdapat pemahaman responden terkait topik penelitian.

1.10.8 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data dilakukan setelah pengumpulan data dari seluruh responden atau sumber data lainnya. Analisis data meliputi pengelompokan data menurut variabel dan jenis responden, penyusunan data berdasarkan variabel dari seluruh responden, penyajian data untuk setiap variabel yang diteliti, serta perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang diajukan.

1.10.8.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Penelitian ini menerapkan Korelasi *Pearson Product Moment* sebagai metode pengukuran validitas instrumen. Validitas pertanyaan kuisioner terverifikasi jika nilai r hitung melebihi r tabel pada tingkat signifikansi 0,05 dengan N = 30. Nilai dari tabel product moment dalam penelitian ini adalah 0,361. Jika angka korelasi berada di bawah angka r tabel, dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut tidak valid dan perlu diperbaiki atau dihapus.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilaksanakan untuk menilai konsistensi instrumen dari waktu ke waktu. Reliabilitas kuisioner dalam penelitian ini diuji menggunakan Koefisien Alpha, mengingat skor pada kuisioner adalah bertingkat antara 1 hingga 4. Rumus Koefisien *Alpha Cronbach* adalah sebagai berikut:

$$r_{ii} = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left\{ 1 - \frac{\sum a^2 b}{st^2} \right\}$$

Keterangan :

r_{ii} = Reliabilitas instrumen

k = Banyaknya butir pertanyaan

M = Jumlah Varian Butir

st^2 = Varian total

Dasar dasar pengambilan keputusan dalam pengujian reliabilitas menurut (Wiratna S. 2014) adalah sebagai berikut

- 1) Jika nilai *Alpha Cronbach's* lebih dari 0,6, maka kuesioner dinyatakan reliabel atau konsisten.
- 2) Jika nilai *Alpha Cronbach's* kecil dari 0,6, maka kuesioner dinyatakan tidak reliabel atau tidak konsisten.

1.10.8.2 Uji Asusmsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian analisis linier sederhana dan berganda, data perlu melalui pengujian asumsi klasik terlebih dahulu. Pengujian ini adalah langkah penting untuk menentukan apakah model regresi yang diterapkan dalam penelitian ini memenuhi kriteria bebas dari penyimpangan asumsi klasik. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai uji normalitas.

1. Uji Normaliitas

Ghozali (2013:160) menyatakan bahwa uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah data variabel independen dan dependen dalam persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang optimal adalah yang memiliki distribusi data normal atau hampir normal. Ada dua metode untuk menguji distribusi normalitas residu, yaitu melalui analisis grafis dan pengujian statistik. Dalam penelitian ini, metode yang diterapkan adalah uji statistik nonparametrik *Kolmogorov-Smirnov* (KS). Pedoman pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai signifikansi normal atau probabilitas $< 0,05$, maka data tidak terdistribusi normal.

- b. Jika nilai signifikansi normal atau probabilitas $> 0,05$, maka data terdistribusi normal.

1.10.8.3 Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis linear sederhana digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel Independen (X) terhadap variabel dependen (Y) dengan bentuk persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Nilai konstanta a dan b dicari dengan menggunakan rumus :

$$a = \frac{\sum Y(\sum X^2) - \sum X \sum XY}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{n \sum X^2 - (\sum X)^2 (\sum X)^2}$$

Keterangan :

Y = Variabel dependen (Efektivitas BLT-DD)

a = Harga Y ketika X=0 (harga konstan)

b = Koefisien Regresi

X = Variabel Independen (Ketepatan Waktu, Ketepatan Sasaran dan *Family Size*)

Pengukuran kuat atau lemahnya hubungan antara variabel bebas dan terikat dilakukan melalui kinerja koefisien korelasi. Jenis korelasi yang dapat diterapkan

pada hubungan variabel garis lurus adalah korelasi *Pearson Product Moment* (r) sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{n \sum X^2 - (\sum X)^2} \sqrt{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

Keterangan :

r_{xy} = koefisien korelasi

X = Variabel Independen

Y = Variabel Dependen

Setelah melakukan perhitungan korelasi, langkah selanjutnya adalah menghitung koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Koefisien determinasi dinyatakan dalam bentuk persentase (%) melalui rumus berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

Kd = Koefisien Determinasi

r^2 = Koefisien Korelasi

1.10.8.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Metode regresi berganda adalah suatu pengembangan dari model regresi sederhana. Model regresi berganda dirancang untuk mengestimasi atau memprediksi nilai variabel dependen (Y) dengan memanfaatkan lebih dari satu

variabel independen (X1, X2, dan seterusnya). Persamaan regresi berganda dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan :

Y = Nilai prediksi dari Y

a = Bilangan konstan

b₁, b₂ = Koefisien variabel bebas

X₁, X₂, X₃ = Variabel independen

X₁ = Ketepatan Waktu Penerimaan

X₂ = Ketepatan Pengukuran (Besaran Penerimaan)

X₃ = *Family Size* (Jumlah Tanggungan Keluarga)

Menentukan kekuatan hubungan antara dua variabel independen dengan Y dilakukan melalui analisis korelasi berganda. Analisis korelasi ganda digunakan untuk memancarkan derajat dan kekuatan hubungan antara variabel X₁, X₂, dan X₃ dengan Y. Korelasi yang diterapkan adalah korelasi ganda dengan menggunakan rumus berikut:

$$R = \sqrt{\frac{b_1 \Sigma X_1 Y + b_2 \Sigma X_2 Y}{\Sigma Y^2}}$$

Keterangan :

R = Koefisien korelasi ganda

b_i = Koefisien regresi

X_1 = Ketepatan Waktu Penerimaan

X_2 = Ketepatan Pengukuran (Besaran Penerimaan)

X_3 = *Family Size* (Jumlah Tanggungan Keluarga)

Y = Efektivitas BLT-DD

Tabel 1.10.8.4 Interpretasi Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat

Sumber : Data Primer, 2024

Setelah korelasi dihitung, langkah selanjutnya adalah menghitung koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen memengaruhi variabel dependen secara keseluruhan. Koefisien determinasi ini digunakan dalam bentuk persentase (%) dan dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

Keterangan :

Kd = Koefisien Determinasi

R = Koefisien korelasi berganda